

NAMA MEDIA : Jateng Pos
TANGGAL : 21 Oktober 2023
KATEGORI : Hukum Pidana

Kejari Sukoharjo Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana BOS

Dugaan penyelewengan dana BOS dimaksud adalah pembelian E-Guru (aplikasi pembelajaran) seharga Rp.3.300.000 x 444 (jumlah SD di Kabupaten Sukoharjo) = Rp 1.465.200.000. Informasinya, aplikasi tersebut tidak dapat digunakan.

Tidak hanya dugaan penyelewengan dana BOS, Kejari Sukoharjo juga mendalami aduan yang disebutkan sudah menjadi temuan BPK Provinsi Jawa Tengah, antara lain, pembelian buku PAI (Pendidikan Agama Islam) seharga Rp 56.000 x jumlah murid Islam se-Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya, pengadaan ulangan harian siswa SD seharga Rp 19.00 x jumlah siswa SD se Kabupaten Sukoharjo, pengadaan kalender untuk siswa

seharga Rp 15.000 x jumlah siswa SD se-Kabupaten Sukoharjo. Terakhir, pengadaan seragam siswa SD seharga Rp 98.000 x jumlah siswa SD se-Kabupaten Sukoharjo.

Empat poin dugaan penyelewengan dana BOS tersebut saat ini sudah dalam penyelidikan Kejari Sukoharjo, bahkan sudah dilakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi untuk mengumpulkan data bahan keterangan.

Kasi Intel Kejari Sukoharjo Galih Martino Dwi Cahyo membenarkan tengah melakukan pendalaman dugaan penyelewengan dana BOS berdasarkan aduan masyarakat yang mengatasnamakan Kepala SD se Kabupaten Sukoharjo, pada Mei 2023 lalu. "Ada surat aduan

masuk bulan Mei lalu terkait dengan E-Guru, buku PAI, dan seragam. Kami sudah lakukan (pemanggilan) klarifikasi, termasuk pemanggilan 11 orang terkait kalender," kata Galih, Jumat (20/10).

Dari pemanggilan klarifikasi yang juga disertai pemeriksaan sejumlah dokumen E-Guru, Galih mengatakan belum menemukan unsur adanya tindak pidana korupsi di dalamnya. Namun begitu, untuk E-Guru saat ini dilakukan pendalaman lagi guna mencari tahu adanya unsur perbuatan melawan hukum.

"Dari aduan itu, juga ada keterkaitannya dengan (jual beli) kalender (SMP). Ini yang lagi ramai kan kalender, makanya kami perdalam lagi. Untuk pelaporan kalender itu kan ada beberapa item (pihak-Red). Tapi untuk aduan yang dari Kepala SD ini kami juga belum tahu atas namanya siapa," ungkap Galih.

Meskipun begitu Kejari Sukoharjo tetap menindaklanjuti dengan memanggil Koordinator

Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), yaitu 2 oknum Kepala SD yang disebut merupakan koordinator untuk mengumpulkan dan mengkondisikan pembelian-pembelian tersebut.

"Dari K3S yang sudah kami panggil ada empat. Dari 11 orang yang sudah kami panggil ada empat di antaranya dari K3S. Untuk yang kalender, buku PAI dan seragam kami fokus terus

mendalami. Jadi kalau kalender ada SD dan juga SMP," ungkap Galih. Ditegaskan Galih, muara dari aduan dugaan penyelewengan dana BOS tersebut (E-Guru, buku PAI, kalender, kertas ulangan, dan seragam), tertuju pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Percada Sukoharjo sebagai penyedia barang dan jasanya.

"Terkait aliran dananya, kami akan minta datanya ke PD Percada. Ini (penyedia barang dan jasa) PD Percada semua. Kemarin dari klarifikasi katanya sudah ada audit oleh BPK, tapi audit itu baru sampai Maret 2023. Untuk itu kami sudah koordinasi dengan BPK untuk meminta hasil auditnya secara keseluruhan," imbuh Galih. (dea/rit)